

KONTRIBUSI PENYERTAAN MODAL BANK PERKREDITAN RAKYAT "BANK PASAR" SLEMAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2001-2005

Retno Susiati

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman
Jalan Parasamya, Beran, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon +62 274 868405 Fax +62 274 868945
E-mail: retnosusiati@yahoo.com

ABSTRACT

Capital enclosing from Sleman Regency Government is done to enhance revenue that comes from the bank's interest. The contribution to Local Original Revenue from such capital enclosing in the past five years; in 2002 was 2.01% from Rp40,795,122,803.56, in 2003 was 0.68% from Rp50,457,136,041.85, in 2004 was 1.26% from Rp58,402,599,877.07, in 2005 was 0.95% from Rp79,581,477,340.31, and in 2006 was 1.16% from Rp86,640,745,946.80. The amount of revenue in Local Original Revenue comes from the part of benefit, which was gained in the previous years, as the increased amount according to the amount of capital enclosing. The result of this research can be considered as the standard of capital adequacy analysis in the Bank of Pasar Sleman in order to know how much the capital is needed to gain optimum benefit, which in turn will enhance the Local Original Revenue of Sleman Regency Government.

Keywords: Capital Enclosing, Local Original Revenue

PENDAHULUAN

Penerapan otonomi daerah membawa konsekuensi bagi daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan di

daerah secara mandiri. Penyelenggaraan pemerintahan yang mandiri ini berimplikasi pada kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah mempunyai sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Sebagai salah satu pendapatan daerah, pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari daerah yang bersangkutan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pajak daerah dan retribusi daerah sudah sangat sulit ditingkatkan karena hanya akan membebani masyarakat dengan pajak dan retribusi yang tinggi, sedangkan dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah sebagian besar atau bahkan hampir seluruhnya terserap pada biaya untuk penggajian pegawai. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu untuk mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah yang lain. Peluang yang paling memungkinkan untuk mengembangkan sumber pendapatan daerah adalah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dalam terminologi regulasi sebelumnya disebut perusahaan daerah. Bagian laba dari BUMD akan menjadi sumber pendapatan alternatif bagi pemerintah daerah.

Dalam regulasi terbaru yang diamanatkan pada pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah dapat membentuk BUMD dengan ketentuan pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan dan/atau pembubarannya diatur dalam peraturan daerah yang berpedoman dengan peraturan perundang-undangan. Pasal ini mempertegas keberadaan BUMD sebagai sebuah lembaga yang diperlukan oleh pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan alternatif bagi pemerintah daerah. Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, disebutkan bahwa modal perusahaan daerah terdiri untuk seluruhnya atau untuk sebagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Oleh karena itu, sebagaimana pemerintah daerah yang lain yang memiliki perusahaan daerah/BUMD, Pemerintah Kabupaten Sleman menyertakan modal kepada perusahaan yang didirikan.

BUMD yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, berimplikasi pada pengalokasian sebagian dana APBD untuk penyertaan modal. Pendanaan BUMD sangat tergantung dari besaran modal yang disertakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah wajib memberikan penyertaan modal yang cukup untuk pengelolaan BUMD hingga menghasilkan laba yang ditargetkan. Tanpa adanya dukungan modal yang cukup, dikhawatirkan BUMD hanya akan menjadikan beban bagi pemerintah daerah. Sumber-sumber keuangan daerah sangat terbatas memunculkan sebuah dilema. Hal ini dikarenakan di satu sisi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan tetap harus mendapatkan prioritas, sedangkan di sisi lain pemerintah daerah dituntut untuk mengembangkan BUMD sebagai sumber pendapatan alternatif.

Salah satu tren yang dilakukan sejak dulu oleh pemerintah daerah adalah membentuk BUMD yang bergerak dalam bidang keuangan. Demikian juga yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman yang pada tahun 1970 membentuk Perusahaan Daerah Bank Pasar Sleman.

Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Pasar Kabupaten Sleman sebagai salah satu BUMD Kabupaten Sleman mendapatkan penyertaan modal yang disetor secara bertahap. Modal ini telah disetor sejak pendirian PD Bank Pasar dengan

jumlah modal yang meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan Laporan Tahunan Tahun 2005 PD BPR Bank Pasar Kabupaten Sleman, hingga tahun 2005 besarnya penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Sleman telah mencapai Rp5.054.241.450,00 dan mampu mendapatkan bagian laba bersih sebesar Rp5.965.765.103,00. Dalam perkembangannya, PD BPR Bank Pasar Kabupaten Sleman semakin diterima oleh masyarakat sehingga untuk pengucuran dananya semakin besar. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Sleman perlu memberikan modal tambahan untuk pengembangan PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Sleman.

Tabel 1
Perkembangan Kredit yang Diberikan BPR Bank
Pasar Kabupaten Sleman
Tahun 2001-2005

No	Tahun	Jumlah (dalam jutaan rupiah)
1	2001	Rp19.357
2	2002	Rp21.680
3	2003	Rp29.046
4	2004	Rp42.074
5	2005	Rp63.653

Sumber: BPR Bank Pasar Kabupaten Sleman.

Dengan adanya tambahan modal dasar tersebut diharapkan akan ada peningkatan pengucuran kredit sehingga meningkatkan pendapatan PD BPR Bank Pasar Kabupaten Sleman dan pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman. Berdasarkan uraian tersebut maka diperlukan penelitian untuk menganalisis penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman pada Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Kabupaten Sleman. Analisis tersebut akan mengupas penyertaan modal tersebut bagi peningkatan pendapatan PD Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, yang selanjutnya akan meningkatkan PAD Kabupaten Sleman.

MATERIDANMETODEPENELITIAN

Untuk menjalankan usaha, setiap perusahaan membutuhkan dana yang diperoleh dari pemilik

perusahaan maupun dari utang. Dana yang diterima perusahaan digunakan untuk membeli aktiva tetap untuk memproduksi barang atau jasa. Konsekuensinya adalah bahwa untuk membentuk suatu perusahaan diperlukan adanya dana atau modal untuk menunjang operasional perusahaan. Modal secara klasik diartikan sebagai hasil produksi yang digunakan untuk memproduksi lebih lanjut. Dalam perkembangannya, pengertian modal mulai bersifat *non-physical oriented*. Pengertian modal ditekankan pada nilai, daya beli, dan kekuasaan memakai, atau menggunakan barang-barang modal.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut maka modal dapat diartikan sebagai kekuasaan penggunaan barang-barang modal yang ada dalam perusahaan dan belum digunakan berupa barang-barang konkrit dalam perusahaan maupun daya beli atau nilai tukar barang-barang itu. Apabila dilihat dari neraca sebuah perusahaan, maka selain menggambarkan adanya modal kongkrit dan modal abstrak, juga akan tampak dua gambaran modal menurut bentuknya dan menurut sumbernya, yaitu modal yang menunjukkan bentuknya disebut modal aktif sedangkan yang menunjukkan sumber atau asalnya disebut modal pasif. Modal aktif termasuk pada pengertian modal kongkrit, sedangkan modal pasif termasuk dalam pengertian modal abstrak. Berdasarkan lamanya perputaran, modal aktif atau kekayaan suatu perusahaan dapat dibedakan menjadi aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar adalah aktiva yang habis dalam satu kali putaran proses produksi. Proses perputarannya dalam jangka waktu yang pendek, umumnya kurang dari 1 tahun. Sedangkan aktiva tetap adalah aktiva yang tahan lama yang tidak atau yang secara berangsur-angsur habis dalam proses produksi. Aktiva lancar misalnya berupa piutang dan inventori, sedangkan aktiva tetap misalnya tanah, bangunan, dan kendaraan.

Berdasarkan asal modal, modal pasif dapat dibedakan antara modal sendiri dan modal asing, atau modal badan usaha dan modal kreditur/utang. Modal sendiri yang sering disebut modal badan usaha adalah modal yang berasal dari perusahaan itu sendiri (cadangan, laba) atau berasal dari pengambil bagian, peserta atau pemilik (modal saham, modal peserta, dan lain-lain). Modal inilah yang menjadi tanggungan terhadap keseluruhan risiko perusahaan dan secara yuridis modal inilah sebagai jaminan bagi para kreditur.

Sedangkan modal asing atau sering disebut juga modal kreditur adalah modal yang berasal dari kreditur, yang merupakan utang bagi perusahaan yang bersangkutan. Perusahaan daerah adalah salah satu bentuk Badan Usaha Milik Daerah yang diamanatkan pada pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 yang berbunyi Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Pasal 7, modal perusahaan daerah terdiri untuk seluruhnya atau untuk sebagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Hal ini menunjukkan bahwa modal perusahaan daerah harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam bentuk penyertaan modal dari kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan.

Pelaksanaan otonomi daerah menempatkan Kabupaten/Kota sebagai daerah yang diberi otonomi secara luas dan utuh menjadi tantangan bagi daerah untuk mengembangkan dan memaksimalkan potensi sehingga nantinya terwujud kemandirian daerah. Kemandirian dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi isu krusial saat ini, harapannya daerah akan mampu menggali sumber keuangan sendiri. Dukungan keuangan dari pemerintah pusat nantinya bukan lagi menjadi sumber utama pendanaan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan tugas pemerintah daerah didanai dari APBD, yang sumber pendapatannya diperoleh dari 1) Pendapatan Asli Daerah dengan komponen PAD terdiri dari pajak, retribusi, laba BUMD, dan lain-lain pendapatan yang sah; 2) Bagi Hasil dengan komponen bagi hasil berasal dari bagi hasil pajak dan bagi hasil non pajak; dan 3) Subsidi Umum terdiri dari Subsidi Khusus dan Pinjaman Daerah.

Sumber pendapatan daerah secara tegas disebutkan dalam UU Nomor 32 tahun 2004 berasal dari PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD menjadi penting karena pendapatan ini sebagai upaya murni pemerintah daerah

dalam mengelola keuangannya. Komposisi pendapatan daerah sampai saat ini masih bertumpu pada pendapatan non-PAD, sehingga ke depan menjadi tantangan bagi daerah untuk mewujudkan PAD sebagai komponen yang lebih berperan dalam perolehan pendapatan daerah. PAD menjadi tanggungjawab daerah dalam pencapaiannya dan dapat dijadikan tolok ukur kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan perannya. Usaha peningkatan PAD menjadi wacana menarik dan menjadi prioritas daerah pada saat ini, sehingga daerah berlomba bagaimana cara untuk mengoptimalkan PAD. Dalam usaha peningkatan PAD ada beberapa aspek yang menjadi kewenangan daerah, dimana memungkinkan daerah untuk mengatur dan merealisasinya. Penggalan dana daerah sebagai sumber penerimaan PAD menurut UU Nomor 32 tahun 2004 dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah.

Penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan kinerja perbankan telah banyak dilakukan. Sutanta R. (1996) dengan tujuan penelitian menilai kinerja BRI unit desa dalam kaitannya dengan provitabilitas, efisiensi usaha, dan risiko usaha. Penelitian ini menganalisis sejauh mana kinerja BRI unit desa ditinjau dari rentabilitas, efisiensi, dan resiko usaha setelah berbagai paket deregulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan langkah yang sebaiknya diambil terutama dalam merencanakan strategi keuangan. Subagyono (1996) dengan tujuan penelitian menganalisis penerapan analisis rasio dalam interpretasi informasi akuntansi sebagai alat bantu manajemen Bank BPD Lampung. Penelitian ini menganalisis apakah laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang tercantum dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 31 tahun 1994 dan untuk mengetahui kegunaan analisis rasio dan interpretasi terhadap laporan keuangan dalam mengambil keputusan dalam manajemen. Heliati (1997) dengan tujuan penelitian mengevaluasi laba BUMD Bank Karya Produksi Desa Kabupaten Tingkat II Bandung. Penelitian ini menganalisis kinerja bank, perkembangan laba, dan prospeknya, serta ada tidaknya hubungan faktor nasabah, peminjam, volume kredit dengan laba bank.

Hendriawan (1998) dengan tujuan penelitian mengetahui perkembangan kinerja BPR Bandar Lampung meneliti apakah telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan perbankan, mengetahui berapa besar pengaruh penyertaan modal terhadap kinerja BPR serta untuk mengetahui apakah prinsip kehati-hatian digunakan oleh manajemen BPR untuk mengambil keputusan dalam mengelola dananya. Metode analisis yang digunakan adalah perhitungan rasio berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/12/Kep/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 30/03/UPPB tanggal 30 April 1997 perihal Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat. Hasil penelitian Hendriawan menunjukkan bahwa kinerja BPR kurang sehat, pengaruh penyertaan modal signifikatif positif serta manajemen BPR menggunakan prinsip kehati-hatian dalam mengambil keputusan.

HASIL PENELITIAN

Perkembangan Neraca BPR Bank Pasar Kabupaten Sleman dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 ditunjukkan pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2
Perkembangan Neraca BPR Bank Pasar Kabupaten Sleman
Tahun 2001 – 2005 (dalam ribuan rupiah)

Keterangan	2001	2002	2003	2004	2005
A. AKTIVA					
1. Kas	585.420	554.285	377.903	701.952	751.307
2. Sertifikat Bank Indonesia	-	-	-	-	-
3. Antar-Bank Aktiva	907.401	4.626.802	15.718.501	19.417.125	8.161.340
4. Kredit yang diberikan	17.171.429	19.679.619	24.099.393	36.557.027	60.695.485
5. Penyisihan penghapusan aktiva produktif -/-	(368.327)	(1.714.388)	(254.250)	(370.551)	(594.677)
6. Aktiva tetap dan Inventaris Kantor					
a. Tanah dan Gedung	474.966	473.028	473.028	473.028	473.028
b. Akumulasi Penyusutan Gedung -/-	(219.895)	(239.950)	(260.846)	(279.382)	(291.264)
c. Inventaris Kantor	645.056	677.192	1.140.015	1.221.651	1.521.199
d. Akumulasi Penyusutan Inventaris -/-	(400.888)	(461.941)	(528.653)	(718.005)	(855.985)
7. Antar Kantor Aktiva	-	-	-	-	-
8. Rupa-rupa Aktiva	780.173	613.409	836.189	844.228	723.491
JUMLAH AKTIVA	19.575.335	24.208.056	41.601.280	57.847.073	70.583.923
B. PASIVA					
1. Kewajiban segera yang dapat dibayar	46.210	39.562	64.412	54.840	61.169
2. Tabungan	7.377.132	10.781.393	22.844.612	36.437.686	43.340.453
3. Deposito berjangka	2.493.420	3.890.620	7.191.470	8.617.520	12.116.670
4. Rupa-rupa Pasiva	842.488	299.133	723.839	779.160	1.005.446
5. Modal					
a. Modal dasar	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
b. Modal Yang Belum Disetor -/-	(7.516.186)	(6.791.186)	(6.445.759)	(5.695.759)	(4.945.759)
6. Cadangan					
a. Cadangan Umum	2.357.894	2.768.450	2.844.237	2.845.801	3.222.486
b. Cadangan Bertujuan	1.921.598	2.356.517	2.537.871	2.924.398	3.270.293
7. Laba / Rugi					
i. Laba	2.052.779	863.567	1.840.598	1.883.427	2.513.164
ii. Rugi -/-	-	-	-	-	-
JUMLAH PASIVA	19.575.335	24.208.056	41.601.280	57.847.073	70.583.923

Sumber: Laporan Tahunan BPR Bank Pasar Kabupaten Sleman tahun 2005.

Perkembangan laporan laba/rugi BPR Bank Pasar Kabupaten Sleman tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 ditunjukkan pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3
Perkembangan Laba/Rugi BPR Bank Pasar Kabupaten Sleman
Tahun 2001-2005 (dalam ribuan rupiah)

Keterangan	2001	2002	2003	2004	2005
A. PENDAPATAN OPERASIONAL	5.273.788	5.680.618	7.554.776	9.005.349	12.068.035
1. Bunga					
a. Dari bank-bank lain					
i. Giro	1.137	764	1.297	4.845	710
ii. Tabungan	64.640	145.576	187.563	231.226	315.435
iii. Deposito berjangka	7.168	73.311	646.647	379.824	973.179
b. Dari pihak ketiga bukan bank	4.700.916	4.917.751	5.981.525	7.324.241	9.190.933
2. Provisi dan Komisi					
a. Provisi dan Komisi Kredit	479.339	534.363	723.199	1.047.866	1.560.266
b. Lainnya	-	-	-	9.011	7.495
3. Lainnya	20.588	8.853	14.545	8.336	20.017
B. BEBAN OPERASIONAL	2.567.161	4.518.945	4.989.207	6.310.957	8.590.713
1. Bunga					
Kepada pihak ketiga bukan bank					
a. Tabungan	754.777	909.437	1.346.807	1.811.331	2.735.900
b. Deposito berjangka	255.567	477.398	855.715	857.357	1.437.133
2. Premi Asuransi	23.927	27.926	38.428	44.667	49.344
3. Tenaga kerja					
a. Gaji, upah dan honorarium	708.109	888.897	1.573.250	1.754.841	2.054.516
b. Biaya pendidikan	23.602	18.693	37.553	55.762	89.430
c. Lainnya	101.211	137.641	179.290	364.988	374.961
4. Sewa	-	-	-	-	-
Pajak-pajak (tidak termasuk pajak	3.074	5.211	5.266	12.062	20.179
5. Pemeliharaan dan perbaikan	41.838	46.998	51.726	59.630	119.972
6. Penyusutan / penghapusan					
a. Aktiva produktif	-	1.337.203	127.292	98.000	209.808
b. Aktiva tetap dan inventaris	109.227	97.316	87.608	207.888	217.403
7. Barang dan jasa pihak ketiga	312.671	337.048	412.847	618.559	773.614
8. Lainnya	233.158	235.177	273.425	425.872	508.453
C. 1. Laba Operasional	2.706.627	1.161.673	2.565.569	2.694.392	3.477.322
2. Rugi Operasional	-	-	-	-	-
D. Pendapatan Non Operasional	188.640	1.027	747	246	44.830
E. Beban Non Operasional	-	-	1.879	32.051	62.107
F. 1. Laba Non Operasional	188.640	1.027	-	-	-
2. Rugi Non Operasional	-	-	(1.132)	(31.805)	(17.277)
G. 1. Laba Tahun Berjalan	2.895.267	1.162.700	2.564.437	2.662.587	3.460.045
2. Rugi Tahun Berjalan	-	-	-	-	-
H. Taksiran Pajak Penghasilan	842.488	299.133	723.839	779.160	946.881
I. 1. Jumlah Laba	2.052.779	863.567	1.840.598	1.883.427	2.513.164
2. Jumlah Rugi	-	-	-	-	-

Sumber: Laporan Tahunan BPR Bank Pasar Kabupaten Sleman 2005.

Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Kabupaten Sleman yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 1970 mengalami berbagai dinamika dan perkembangan. Salah satu dinamika adalah modal disetor yang pada awal pendirian sebesar Rp1.000.000,00 kemudian berkembang sampai dengan tahun 2005 menjadi Rp5.000.000.000,00 dari ketentuan modal dasar yang harus dipenuhi sebesar Rp10.000.000.000,00. Besaran modal dasar ini ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 30 tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah BPR BANK PASAR Kabupaten Sleman, sebagai regulasi terbaru yang mengatur Bank Pasar Sleman.

Eksistensi Bank Pasar Sleman saat ini telah mengakar kuat pada masyarakat Sleman baik pada nasabah perorangan maupun Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang banyak merasakan manfaat Bank Pasar Sleman, karena sesuai dasar pemikiran pada awal pendiriannya yang berusaha melindungi masyarakat Sleman dari berbagai praktik keuangan yang tidak sehat, seperti banyak beroperasinya lintah darat yang menjerat masyarakat dan pengusaha skala kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Sleman. Dengan demikian, diharapkan akan tumbuh iklim perekonomian yang sehat sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman.

Berdasarkan sisi Pemerintah Kabupaten Sleman, keberadaan Bank Pasar Sleman diharapkan menjadi salah satu alternatif sumber penerimaan dalam komponen PAD, sejalan dengan nuansa otonomi daerah yang berkembang saat ini dimana daerah diberi keleluasaan untuk mengelola potensi bagi kepentingan masyarakat dan pemerintah daerah. Pengelolaan Bank Pasar Sleman secara profesional tentunya menjadi keinginan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan pada PAD Kabupaten Sleman.

Eksistensi Bank Pasar Kabupaten Sleman sangat tergantung pada ketersediaan modal untuk operasional perbankan. Ketersediaan modal pada Bank Pasar Kabupaten Sleman masih mengandalkan pada penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai pemilik. Ketergantungan pada penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Sleman karena Bank Pasar Sleman belum dapat sepenuhnya mengandalkan operasional perbankannya dari penarikan dana nasabah baik dari deposito maupun

tabungan karena besaran dana yang dapat ditarik belum secara signifikan dapat memenuhi kebutuhan kredit yang dikururkan. Selain itu, unsur keamanan likuiditas juga menjadi salah satu alasan dengan penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Sleman maka kemungkinan terjadi penarikan dana nasabah secara besar-besaran dapat diatasi, berbeda apabila dana dihimpun murni dari nasabah, kemungkinan terjadinya hal tersebut sangat mungkin terjadi karena adanya perubahan regulasi makro yang sering terjadi pada pengaturan perbankan. Untuk menjaga keamanan dan eksistensi Bank Pasar Sleman ke depan maka penyertaan modal menjadi kebijakan yang akan terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman.

Penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Sleman pada Bank Pasar Sleman dari sisi manajemen Bank Pasar Sleman dianggap sebagai alternatif terbaik untuk penambahan modal, karena akan menjaga keamanan likuiditas Bank Pasar Sleman. Penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Sleman tetap diharapkan untuk terus dilakukan dengan besaran menyesuaikan dengan kondisi faktual Bank Pasar Sleman saat ini, sehingga akan menjaga eksistensi Bank Pasar Sleman dan meningkatkan daya saing dengan kompetitor. Penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Sleman pada Bank Pasar akan terus dilakukan juga karena berdasar pada tujuan awal pembentukannya untuk melindungi masyarakat Sleman dari berbagai praktik kegiatan keuangan yang sangat merugikan masyarakat, di antaranya adalah untuk mengantisipasi praktek lintah darat yang sering terjadi pada masyarakat tingkat bawah. Bank Pasar Kabupaten Sleman dibentuk sebagai salah satu wujud tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Sleman untuk melindungi masyarakatnya dari berbagai praktik kegiatan keuangan yang sangat merugikan masyarakat dan menghambat pertumbuhan perekonomian.

Beberapa alasan dilakukannya penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sleman pada Bank Pasar Sleman adalah 1) Wujud tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Sleman; 2) Menjaga keberlangsungan Bank Pasar Kabupaten Sleman; 3) Peningkatan sumber PAD; 4) Kebutuhan pasar; dan 5) Kecukupan modal. Secara substansial penyertaan modal tersebut adalah sebagai wujud tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Sleman untuk menjaga kelangsungan PD BPR Bank Pasar Kabupaten Sleman. Penyertaan modal dilakukan untuk

menjamin agar Bank Pasar Kabupaten Sleman tetap eksis. Suntikan dana Pemerintah Kabupaten Sleman akan menjaga kelangsungan operasional Bank Pasar. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah yang membentuknya. Bahkan apabila perlu penambahan modal dapat terus dilakukan meskipun modal dasar telah terpenuhi kalau dipandang hal tersebut dapat meningkatkan performa perbankan dari Bank Pasar. Dengan demikian, keberadaan Bank Pasar Sleman dapat memberikan manfaat dan nilai lebih bagi Pemerintah Kabupaten Sleman dan masyarakat.

Tujuan penyertaan modal yang lain adalah untuk menjaga kelangsungan Bank Pasar Kabupaten Sleman. Keberadaan Bank Pasar Kabupaten Sleman sangat tergantung pada kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman, sehingga dari sisi permodalan Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menjaga *cash flow* Bank Pasar Kabupaten Sleman agar tetap dapat beroperasi secara optimal. Pada dasarnya, pembentukan Bank Pasar Kabupaten Sleman adalah untuk menjaga kelangsungan usaha kecil dan menengah (UKM) yang ada di Kabupaten Sleman, sehingga keberadaan Bank Pasar Kabupaten Sleman sangat diperlukan untuk melindungi pengusaha kecil dan menengah serta masyarakat Kabupaten Sleman. Perlindungan kepada UKM ini pada gilirannya akan menghidupkan roda perekonomian rakyat yang selanjutnya dapat mendorong perkembangan perekonomian masyarakat bawah. Dengan demikian, keberadaan Bank Pasar Kabupaten Sleman harus dijaga keberlangsungannya dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman. Salah satu kebijakan yang ditempuh untuk tetap menjaga eksistensi dan mengembangkan Bank Pasar Kabupaten Sleman adalah dengan tetap memberikan penyertaan modal. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa salah satu tujuan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sleman pada Bank Pasar Sleman adalah untuk menjaga keberlangsungan operasional Bank Pasar Kabupaten Sleman, sehingga dapat beroperasi secara optimal dan bisa mendorong perekonomian masyarakat Sleman.

Tujuan penyertaan modal lainnya adalah untuk meningkatkan penerimaan PAD. Sejalan dengan semangat penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengeksplorasi potensi sumber PAD. Salah satu upaya yang kemudian dilakukan adalah menggali potensi dari

hasil laba perusahaan daerah yang dimiliki. Kabupaten Sleman sebagai pemilik Bank Pasar Sleman juga mengharapkan adanya kontribusi dari Bank Pasar Sleman ini bagi peningkatan penerimaan PAD. Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai pemilik Bank Pasar Kabupaten Sleman tentunya mengharapkan kontribusi berupa penerimaan PAD dari laba bersih Bank Pasar Sleman dari penyertaan modal yang diberikan pada Bank Pasar Sleman. Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman saat ini dari laba bersih yang diperoleh dari Bank Pasar Sleman adalah mengkonversi laba bersih tersebut sebagai penyertaan modal pada tahun berikutnya. Bagian laba bersih yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Sleman dari Bank Pasar Sleman tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 adalah Rp821.111.763,00 (2001), Rp345.427.038,00 (2002); Rp736.238.961,00 (2003); Rp753.370.629,00 (2004); dan Rp1.005.265.563,00 (2005). Pemenuhan modal dasar tersebut akan mengoptimalkan operasional Bank Pasar Kabupaten Sleman sehingga diharapkan terdapat peningkatan laba bersih yang nantinya akan menambah penerimaan PAD dari sumber laba Bank Pasar Kabupaten Sleman. Secara normatif pemenuhan modal dasar ini dilakukan karena ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Daerah yang mengatur Bank Pasar Sleman. Dengan demikian, salah satu tujuan dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sleman pada Bank Pasar Sleman adalah untuk meningkatkan penerimaan PAD dari sumber laba bersih Bank Pasar Sleman. Imbal balik dari penyertaan modal tersebut adalah adanya penerimaan laba bersih yang akan masuk menjadi sumber penerimaan PAD Kabupaten Sleman.

Sejalan dengan pertumbuhan Bank Pasar Kabupaten Sleman yang semakin dapat diterima oleh masyarakat, maka kebutuhan masyarakat akan keberadaan Bank Pasar Kabupaten Sleman semakin tinggi. Artinya ketika eksistensi Bank Pasar Kabupaten Sleman semakin diakui oleh masyarakat maka berimplikasi pada semakin banyaknya transaksi yang dilakukan oleh masyarakat baik sebagai penabung, deposan, maupun kreditur. Untuk mengantisipasi hal tersebut perlu adanya penambahan modal yang dapat digunakan untuk meningkatkan operasional Bank Pasar Kabupaten Sleman untuk menjawab kebutuhan pasar. Bank Pasar Sleman mempunyai pangsa pasar yang sama dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) lain, sehingga kompetitor utama Bank Pasar Sleman saat ini adalah

BPR yang menjamur di wilayah Kabupaten Sleman dan sekitarnya dengan segmen pasar adalah masyarakat dan pengusaha skala kecil dan menengah. Penyertaan modal mestinya dapat dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan pasar, dengan melihat segmentasinya, sehingga penyaluran dana dari Bank Pasar Sleman harus melihat kekuatan pasar.

Kekuatan pasar dari Bank Pasar Sleman lebih pada segmen masyarakat bawah dan usaha kecil menengah yang bukan menjadi konsentrasi pasar Bank Umum. Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat pada keberadaan BPR secara umum menjadi sebuah potensi yang dapat diraih Bank Pasar Sleman. Untuk merespon kebutuhan pasar tersebut maka ketersediaan modal sangat diperlukan untuk memenuhi tuntutan pasar, penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Sleman pada Bank Pasar Sleman akhirnya menjadi penting dilakukan untuk menjawab kebutuhan pasar riil tersebut. Untuk memperkuat posisi Bank Pasar Kabupaten Sleman dalam persaingan dengan lembaga perbankan lainnya ke depan Pemerintah Kabupaten Sleman akan terus menyertakan modal meskipun modal dasar telah tercapai. Berdasarkan kebutuhan pasar secara riil tersebut maka Pemerintah Kabupaten Sleman akan tetap menyertakan modal pada Bank Pasar Kabupaten Sleman untuk memperkuat posisi Bank Pasar Kabupaten Sleman agar dapat merespon kebutuhan pasar.

Respon pada kebutuhan pasar tersebut juga dapat dilihat dari jumlah loket pembantu untuk layanan nasabah. Pada awal berdirinya pada tahun 1970 Bank Pasar Sleman hanya memiliki 4 cabang pembantu untuk melayani kredit di Pasar Prambanan, Pasar Pakem, Pasar Godean dan Pasar Tempel. Kondisi saat ini terdapat 19 loket pembantu. Sebelumnya, pernah ada 22 loket pembantu, tetapi kemudian terdapat tiga loket

pembantu yang digabungkan untuk efisiensi yaitu loket pembantu pasar Colombo pada loket pembantu pasar Gentan, loket pembantu pasar Bibis pada loket pembantu pasar Gamping dan Godean, serta loket pembantu pasar Potrojayan pada loket pembantu pasar Prambanan dan Tegalsari. Perkembangan loket pembantu untuk layanan nasabah ini menunjukkan bahwa keberadaan Bank Pasar Sleman semakin diterima masyarakat, sehingga perlu direspon dengan memperbanyak loket pembantu untuk mendekatkan layanan pada nasabah. Penambahan loket pembantu ini tentunya juga terkait dengan kebutuhan penambahan modal untuk operasionalnya, sehingga penambahan modal dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sleman sangat perlu dilakukan.

Penambahan jumlah loket pembantu ini diikuti dengan penambahan jumlah pegawai Bank Pasar Sleman untuk menunjang operasionalnya. Perkembangan jumlah pegawai sebanding dengan jumlah loket pembantu yang dibuka untuk mengcover operasional Kantor Pusat dan Loket Pembantu. Demikian juga dengan kualitas pegawai yang semakin membaik dilihat dari tingkat pendidikan pegawai. Komposisi pegawai Bank Pasar Sleman adalah sebagai berikut:

Berdasarkan data pada Tabel 4 terlihat ada peningkatan jumlah pegawai dari tahun 2001 sebanyak 54 pegawai menjadi 62 pegawai pada tahun 2005, kualifikasi pendidikan pegawai juga ada kecenderungan meningkat, serta komposisi pegawai didominasi pegawai usia 31 tahun sampai usia 45 tahun, sehingga potensi untuk meningkatkan performa perusahaan dari potensi sumberdaya manusia di Bank Pasar Sleman sangat dimungkinkan. Hal tersebut dapat dijadikan upaya untuk menjawab kebutuhan pasar yang semakin meningkat, artinya eksistensi Bank Pasar Sleman yang sudah diterima masyarakat juga harus diimbangi

Tabel 4
Komposisi Pegawai BPR Bank Pasar Kabupaten Sleman

No	Tahun	Jumlah Pegawai	Tingkat Pendidikan							Tingkat Usia			
			SD	SLTP	SLTA	Dipl	S1	S2	20-30	31-35	36-40	41-45	46-
1.	2001	54	1	6	26	9	11	1	16	13	13	7	5
2.	2002	52	1	6	23	9	12	1	11	16	13	9	3
3.	2003	53	1	6	23	9	13	1	9	17	15	8	4
4.	2004	54	1	3	26	9	14	1	11	13	15	8	7
5.	2005	62	1	2	30	10	19	-	13	15	12	14	8

Sumber: BPR Bank Pasar Kabupaten Sleman. Data diolah.

dengan performa perusahaan yang semakin semakin baik. Dilihat dari potensi sumberdaya manusia yang dimiliki oleh Bank Pasar Sleman memungkinkan untuk meningkatkan performa untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat.

Penyertaan modal yang diberikan pada Bank Pasar Sleman oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dilakukan untuk memenuhi kecukupan modal yang diperlukan untuk operasional perbankan di Bank Pasar Sleman. Modal yang harus dimiliki Bank Pasar Sleman dapat diketahui dari kekuatan pasar, seberapa besar segmen pasar yang dapat diraih oleh Bank Pasar Sleman. Hal tersebut dapat dilihat dari sebaran nasabah, besaran kredit yang dikucurkan dengan melihat perkembangan dari tahun-ketahun, serta memprediksi perkembangan beberapa tahun kedepan. Perkembangan tersebut dilihat dari perkembangan perekonomian lokal dan kucuran kredit yang diberikan pada masyarakat. Perkembangan tren pasar tersebut dapat dilihat dari data mengenai perkembangan

nasabah dan kredit yang dikucurkan oleh Bank Pasar Sleman seperti pada Tabel 5 berikut ini:

Perkembangan penyaluran kredit dan besaran dana yang dikucurkan dapat dilihat pada Tabel 5. Nampak dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 terjadi tren peningkatan jumlah nasabah terutama dari Kredit Karyawan (KK) dan terlihat bahwa segmen pasar terbesar dari Bank Pasar Sleman adalah PNS, TNI, POLRI, dan Pegawai Swasta dengan kredit yang dikucurkan juga mengalami peningkatan setiap tahun. Sedangkan untuk Kredit Umum (KU) juga mengalami peningkatan jumlah nasabah maupun besaran kreditnya, meskipun secara kuantitatif sangat jauh berbeda dengan segmen Kredit Karyawan (KK). Kredit Umum bagi pedagang, pengrajin, industri, dan sebagainya ternyata bukan menjadi *market share* utama dari Bank Pasar Sleman. Perkembangan deposito dan depositan di Bank Pasar Sleman dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini:

Tabel 5
Perkembangan Nasabah BPR Bank Pasar Kabupaten Sleman
Tahun 2001 – 2005

No	Jenis Kredit	Rek (org)	2001		2002		Tahun 2003		2004		2005	
			OSC (000)	Rek (org)	OSC (000)	Rek (org)	OSC (000)	Rek (org)	OSC (000)	Rek (org)	OSC (000)	
1.	KK	5.225	12.438.967	4.949	14.384.319	5.065	19.857.781	5.268	31.588.898	6.073	54.283.518	
2.	KU	304	1.279.689	333	1.355.622	348	1.751.495	390	2.299.392	473	3.451.843	
Total		5.529	13.718.656	5.282	15.739.941	5.413	21.609.276	5.658	33.888.290	6.546	57.735.361	

Sumber: BPR Bank Pasar Kabupaten Sleman

Keterangan: Kredit Karyawan (KK): melayani PNS, TNI/POLRI, dan Pegawai Swasta Kredit Umum (KU): melayani pedagang, pengrajin, pengusaha, industri, pertanian, kelompok, dan usaha-usaha lain.

Tabel 6
Perkembangan Deposito BPR Bank Pasar Kabupaten Sleman
Tahun 2001 – 2005

No.	Tahun	Nominal (ribuan rupiah)	Deposan (orang)
1.	2001	2.493.420	298
2.	2002	3.890.620	346
3.	2003	7.191.470	398
4.	2004	8.617.520	469
5.	2005	12.116.670	601

Sumber: Laporan Tahunan BPR Bank Pasar Kabupaten Sleman 2005.

Perkembangan deposito maupun nominal deposito di Bank Pasar Sleman menunjukkan peningkatan cukup besar tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan semakin dipercayanya Bank Pasar Sleman oleh para nasabah sehingga semakin meningkatkan kepercayaan nasabah untuk menempatkan dananya di Bank Pasar Sleman. Berdasar perkembangan Bank Pasar Sleman dari pertumbuhan jumlah nasabah dan kredit yang dikururkan maupun dari jumlah deposito serta deposito di Bank Pasar Sleman, serta kekuatan pasar pada segmen kredit karyawan untuk PNS, TNI/POLRI, dan Karyawan Swasta, maka penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Sleman diperlukan untuk menambah kecukupan modal guna mengantisipasi tren pasar, kekuatan pasar, dan perkembangan ekonomi lokal yang akan meningkatkan perkembangan Bank Pasar Sleman. Peningkatan kapasitas modal di Bank Pasar Sleman akan lebih mengoptimalkan operasionalnya dan pada gilirannya juga akan meningkatkan pendapatan dari Bank Pasar Sleman.

Sejak didirikan pada tahun 1970 dengan dasar Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 1962 tanggal 19 Mei 1962 tentang Mengadakan Bank Pasar, kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Sleman Nomor 6/K/1969 tanggal 21 Januari 1969 tentang Penetapan Bank-bank Pasar, dan Keputusan Bupati Sleman Nomor 3/K/1970 tanggal 24 Maret 1970 tentang pedoman Pelaksanaan Bank Pasar Daerah Kabupaten Sleman. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, Bank Pasar Kabupaten Sleman mulai beroperasi sejak tahun 1970 hingga sekarang. Pada awal operasionalnya Pemerintah Kabupaten Sleman menyertakan modal sebesar Rp1.000.000,00. Kemudian dalam perkembangannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 30 tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sleman ditentukan modal dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Sleman menjadi Rp10.000.000.000,00. Sampai dengan tahun 2005 modal disetor pada Bank Pasar Kabupaten Sleman telah mencapai Rp5.054.241.000,00. Perkembangan modal disetor sampai dengan tahun 2005 ditunjukkan pada Tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7
Jumlah Modal Disetor BPR Bank Pasar
Kabupaten Sleman
Tahun 2001-2005

No.	Tahun	Jumlah Setoran (Rp)
1.	2000	400.000.000,00
2.	2001	625.000.000,00
3.	2002	725.000.000,00
4.	2003	345.427.038,00
5.	2004	750.000.000,00
6.	2005	750.000.000,00
Jumlah		5.054.241.450,00

Sumber: BPR Bank Pasar Kabupaten Sleman.
Data diolah.

Bagian laba Bank Pasar Sleman ke Pemerintah Kabupaten Sleman adalah 40% dari laba bersih setelah pajak. Percepatan pemenuhan modal dasar ini dilakukan karena untuk mendorong peningkatan pendapatan dari bagian laba bersih Bank Pasar Sleman. Dalam perhitungan besaran keuntungan yang akan diperoleh, dibandingkan dengan apabila dana tersebut diwujudkan dalam bentuk deposito hanya akan memperoleh bunga antara 8% sampai dengan 13% pertahun, sedangkan apabila dimasukkan dalam penyertaan modal pertambahannya mencapai 24% pertahun. Dengan demikian, akan sangat menguntungkan apabila dana yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dialokasikan untuk penyertaan modal dibanding apabila didepositokan. Keuntungan lainnya adalah dengan penyertaan modal tersebut akhirnya akan meningkatkan likuiditas Bank Pasar Sleman sehingga dapat mengoptimalkan kinerja perbankannya dan terjadi penambahan keuntungan.

PEMBAHASAN

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sleman pada Bank Pasar Sleman yang dilakukan sejak awal pendirian sampai dengan saat ini, tentunya dengan harapan adanya kontribusi untuk penerimaan dalam PAD sebagai sumber pendapatan yang dapat terus dikembangkan. Kontribusi jangka panjang dengan kontinuitas operasional Bank Pasar Sleman menjadi salah satu tujuan penyertaan modal, sehingga

penerimaan daerah dari laba Bank Pasar Sleman juga terjaga dalam waktu lama. Skema penyertaan modal ini kemudian akan dilakukan kajian apabila telah terjadi optimalisasi keuntungan dari besaran modal yang disetor. Kebijakan yang dilakukan saat ini adalah Pemerintah Kabupaten Sleman akan tetap menyertakan modal untuk memenuhi ketentuan modal dasar, dan sampai setelah modal dasar terpenuhi tetap akan menyertakan modalnya untuk meningkatkan kapasitas modal Bank Pasar Sleman yang pada saatnya nanti keuntungan dari laba Bank Pasar Sleman dapat meningkat yang akhirnya akan meningkatkan penerimaan dalam PAD Kabupaten Sleman.

Penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Sleman sangat diperlukan, karena kebutuhan operasional perbankan Bank Pasar Sleman meningkat pesat. Kebutuhan untuk pengucuran kredit meningkat setiap tahunnya, sebaran nasabahnya saat ini semakin meluas tidak hanya dari masyarakat Kabupaten Sleman, tetapi sekitar 40% nasabah berasal dari luar masyarakat Sleman, dengan pangsa pasar utama adalah kredit karyawan. Untuk memperoleh modal dapat juga dilakukan dengan mencari pinjaman dari bank lain, tetapi hal ini kurang menguntungkan bagi Pemerintah Kabupaten Sleman karena laba Bank Pasar Sleman akan banyak terserap untuk pembayaran bunga pinjaman. Artinya apabila Pemerintah Kabupaten Sleman tidak menambah penyertaan modalnya maka akan kehilangan potensi pendapatannya dari laba Bank Pasar Sleman.

Berdasar perkembangan tentang neraca dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 dapat terlihat bahwa laba Bank Pasar Sleman secara umum mengalami kenaikan sebanding dengan besarnya modal yang dimiliki. Pada tahun 2002 besaran laba menurun, dari Rp2.052.779.000,00 pada tahun 2001 menjadi Rp863.567.000,00 pada tahun 2002 karena penyisihan penghapusan aktiva produktif sangat besar yakni Rp1.714.388.000,00. sehingga sangat mempengaruhi laba bersih yang diperoleh. Apabila dilihat dari kredit yang dikucurkan pada nasabah terjadi peningkatan yang cukup besar. Pada tahun 2002 terjadi penurunan laba, kondisi tersebut terjadi karena tingginya *Non Performing Loan* (NPL) atau kredit macet yang terjadi di Bank Pasar Sleman, sehingga kemudian ada penyusutan/ penghapusan aktiva produktif yang cukup besar yakni senilai Rp1.337.203.000,00. Nilai penyusutan/ penghapusan ini sangat besar sehingga mempengaruhi

besaran laba yang diperoleh Bank Pasar Sleman.

Setoran bagian laba Bank Pasar Sleman kepada Pemerintah Kabupaten Sleman dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 dapat dilihat pada Tabel 8 berikut ini:

Tabel 8
Bagian Laba Diterima Pemerintah Kabupaten Sleman
Tahun 2001-2005

No.	Tahun	Jumlah Setoran Laba (Rp)
1.	2001	725.448.450,00
2.	2002	821.111.763,00
3.	2003	345.427.038,00
4.	2004	736.238.961,00
5.	2005	753.370.629,00
6.	2006	1.005.265.563,00
	Jumlah	6.971.030.666,00

Sumber: BPR Bank Pasar Kabupaten Sleman.
Data diolah.

Dilihat dari Tabel 8, setoran laba Bank Pasar Sleman pada Pemerintah Kabupaten Sleman dari tahun 2001 sampai 2005 terjadi fluktuasi besaran laba yang diterima, akan tetapi setiap tahunnya ada tren peningkatan besaran laba yang diterima oleh Kabupaten Sleman. Fluktuasi penerimaan bagian laba Pemerintah Kabupaten Sleman tersebut tergantung dari laba yang di peroleh Bank Pasar Sleman. Besaran laba yang diperoleh Bank Pasar Sleman tergantung dari keuntungan operasional perbankannya yang dipengaruhi oleh kondisi perekonomian secara luas dan kebijakan perbankan yang diterapkan pemerintah. Untuk mengetahui perkembangan modal disetor dan persentase perkembangannya dapat dilihat pada Tabel 9 berikut ini:

Tabel 9
Perkembangan Modal Disetor BPR Bank Pasar Kabupaten Sleman
Tahun 2001 – 2005

Tahun	Tambahan Modal (Rp)	Jumlah Modal Disetor (Rp)	Persentase Modal Disetor dari Modal Dasar (%)	Peningkatan Modal Disetor (%)
2001	0	2.483.814.000,00	24,84	0
2002	725.000.000,00	3.208.814.000,00	32,09	7,25
2003	345.427.000,00	3.554.241.000,00	35,54	3,45
2004	750.000.000,00	4.304.241.000,00	43,04	7,50
2005	750.000.000,00	5.054.241.000,00	50,54	7,50

Sumber: BPR Bank Pasar Kabupaten Sleman. Data diolah.

Pada tahun 2001 Pemerintah Kabupaten Sleman tidak menambahkan penyertaan modal, karena pada waktu itu ada kebijakan yang memprioritaskan pada peningkatan layanan publik, sehingga bagian laba dari Bank Pasar Sleman dialihkan alokasinya tidak ditambahkan pada penyertaan modal tetapi dialihkan pada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan layanan dasar kepada masyarakat. Bagian laba pada tahun 2001 yang diperoleh dari hasil operasional Bank Pasar Sleman tahun 2000 sebesar Rp563.869.620,00 tidak dimasukkan sebagai penyertaan modal seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Penambahan penyertaan modal dilakukan lagi pada tahun 2002 dengan mengkonversi bagian laba yang diperoleh pada tahun 2001 untuk dijadikan modal disetor pada Bank Pasar Sleman.

Berdasarkan pada data tersebut terlihat adanya peningkatan persentase jumlah modal disetor setiap

tahunnya. Sampai tahun 2005 persentase jumlah modal disetor menjadi 50,54% dari modal dasar. Berdasarkan perkembangan tersebut terlihat ada upaya dari Pemerintah Kabupaten Sleman untuk memenuhi modal dasar yang ditetapkan, dengan pemenuhan modal dasar tersebut diharapkan akan meningkatkan jumlah kredit yang dikucurkan. Dengan peningkatan jumlah kredit tersebut akan meningkatkan pendapatan Bank Pasar Sleman yang pada gilirannya juga akan meningkatkan bagian laba yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Sleman.

Penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai salah satu sumber likuiditas untuk operasional perbankan Bank Pasar Sleman, sampai saat ini cukup memberikan arti bagi peningkatan jumlah kredit yang dikucurkan, kondisi ini dapat terlihat dari Tabel 10 berikut ini:

Tabel 10
Perkembangan Jumlah Kredit Tahun 2001 - 2005

Tahun	Modal Disetor	Jumlah Kredit	Peningkatan Jumlah Kredit (%)
2001	2.483.814.000,00	17.171.429.000,00	12,98
2002	3.208.814.000,00	19.679.619.000,00	14,61
2003	3.554.241.000,00	24.099.393.000,00	22,46
2004	4.304.241.000,00	36.557.027.000,00	51,69
2005	5.054.241.000,00	60.695.485.000,00	66,03

Sumber: BPR Bank Pasar Kabupaten Sleman. Data diolah.

Menurut data pada Tabel 10, jumlah kredit yang dikucurkan Bank Pasar Sleman meningkat setiap tahunnya. Dengan adanya penambahan jumlah modal disetor akan meningkatkan jumlah kredit yang dapat dikucurkan oleh Bank Pasar Sleman. Peningkatan jumlah kredit yang dikucurkan Bank Pasar Sleman selain dari penambahan modal disetor tentunya juga berasal dari dana nasabah dan dana pinjaman pihak ketiga. Secara jelas terlihat dari data tersebut bahwa peningkatan jumlah modal disetor sangat berpengaruh pada peningkatan jumlah kredit yang bisa diberikan.

Sebanding dengan peningkatan kredit yang dikucurkan akan meningkatkan pendapatan Bank Pasar Sleman yang akhirnya juga akan meningkatkan bagian laba yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Sleman. Perkembangan laba tersebut akan terlihat pada Tabel 11 berikut ini:

Berdasarkan data pada Tabel 11, terlihat fluktuasi laba yang diperoleh Bank Pasar Sleman.

Besaran jumlah kredit yang dikucurkan tidak berpengaruh langsung pada besaran laba yang diperoleh, laba yang diperoleh ditentukan oleh faktor suku bunga yang menjadi kebijakan pemerintah atau adanya kondisi lain yang turut menentukan perolehan laba. Penurunan laba yang cukup besar disebabkan karena tingginya NPL yang berakibat pada penyusutan aktiva produktif dan mengurangi cadangan modal, akibatnya perolehan laba juga mengalami penurunan drastis. Dampak dari penurunan laba yang diperoleh Bank Pasar Sleman tersebut akan mengurangi bagian laba yang akan diterima oleh Pemerintah kabupaten Sleman. Bagian laba yang akan diperoleh Pemerintah Kabupaten Sleman tergantung pada besaran laba yang diperoleh Bank Pasar Sleman.

Perkembangan bagian laba yang diperoleh Pemerintah kabupaten Sleman dapat dilihat dari Tabel 12 berikut ini:

Tabel 11
Perkembangan Laba Tahun 2001 – 2005

Tahun	Jumlah Kredit (Rp)	Laba Bank Pasar (Rp)	Perkembangan Laba (%)
2001	17.171.429.000,00	2.052.779.000,00	45,62
2002	19.679.619.000,00	863.567.000,00	-57,93
2003	24.099.393.000,00	1.840.598.000,00	113,14
2004	36.557.027.000,00	1.883.427.000,00	2,33
2005	60.695.485.000,00	2.513.164.000,00	33,44

Sumber: BPR Bank Pasar Kabupaten Sleman. Data diolah.

Tabel 12
Perkembangan Bagian Laba Pemerintah Kabupaten Sleman dari Modal Disetor, Tahun 2001 – 2005

Tahun	Modal Disetor	Bagian Laba Kabupaten Sleman	Persentase Bagian laba dari Modal Disetor (%)
2001	2.483.814.000,00	821.111.763,00	33,06
2002	3.208.814.000,00	345.427.038,00	10,76
2003	3.554.241.000,00	736.238.961,00	20,71
2004	4.304.241.000,00	753.370.629,00	17,50
2005	5.054.241.000,00	1.005.265.563,00	19,89

Sumber: BPR Bank Pasar Kabupaten Sleman. Data diolah.

Bagian laba yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Sleman dari modal disetor pada Bank Pasar Sleman cukup besar yaitu berkisar antara 10% sampai dengan 19% dari jumlah modal yang disetor. Kisaran ini cukup besar apabila dibandingkan dengan bentuk investasi lain misalnya dalam bentuk deposito. Bagi Pemerintah Kabupaten Sleman meskipun laba yang diperoleh dari Bank Pasar Sleman fluktuatif tetapi masih cukup menguntungkan bagi pendapatan dalam PAD Pemerintah Kabupaten Sleman. Sampai dengan tahun 2005 bagian laba yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Sleman masih cukup besar dan dianggap cukup menguntungkan, sehingga penyertaan modal ke Bank Pasar Sleman masih perlu dilakukan.

Perkembangan bagian laba Pemerintah Kabupaten Sleman dari jumlah kredit yang dikucurkan Bank Pasar Sleman terlihat pada Tabel 13 berikut ini:

Perkembangan modal disetor, jumlah kredit, laba Bank Pasar, dan bagian laba diterima Pemerintah Kabupaten Sleman Pertahun (2001 – 2005) secara komprehensif dapat dilihat dari Tabel 14 sebagai berikut:

Apabila dilihat dari peningkatan jumlah kredit yang dikucurkan terjadi peningkatan sangat besar sampai 66,03 % dari tahun sebelumnya, tetapi pendapatan laba Bank Pasar Sleman tidak menunjukkan angka sebanding. Hal tersebut terjadi karena adanya kebijakan perbankan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia yang menetapkan suku bunga tinggi pada tabungan dan deposito, sehingga pendapatan dari operasional Bank Pasar Sleman banyak dialokasikan untuk memberikan bunga bagi dana nasabah yang disimpan dalam bentuk tabungan maupun deposito. Pendapatan yang diperoleh Bank Pasar Sleman baik pengucuran kredit maupun

Tabel 13
Perkembangan Laba Diperoleh dengan Jumlah Kredit
Tahun 2001- 2005

Tahun	Modal Disetor	Bagian Laba Kabupaten Sleman (Rp)	Persentase Bagian laba dari Modal Disetor (%)
2001	17.171.429.000,00	821.111.763,00	4,78
2002	19.679.619.000,00	345.427.038,00	1,75
2003	24.099.393.000,00	736.238.961,00	3,06
2004	36.557.027.000,00	753.370.629,00	2,06
2005	60.695.485.000,00	1.005.265.563,00	1,66

Sumber: BPR Bank Pasar Kabupaten Sleman. Data diolah.

Tabel 14
Perkembangan Modal Disetor, Jumlah Kredit, Laba Bank Pasar, dan
Bagian Laba diterima Pemerintah Kabupaten Sleman, Tahun 2001 – 2005

Tahun	Modal Disetor	(%)	Jumlah Kredit	(%)	Laba Bank Pasar	(%)	Bagian Laba Kabupaten Sleman	(%)
2001	2.483.814.000,00	0	17.171.429.000,00	12,98	2.052.779.000,00	45,62	821.111.763,00	45,62
2002	3.208.814.000,00	29,19	19.679.619.000,00	14,61	863.567.000,00	-57,93	345.427.038,00	-57,93
2003	3.554.241.000,00	10,76	24.099.393.000,00	22,46	1.840.598.000,00	113,14	736.238.961,00	113,14
2004	4.304.241.000,00	21,10	36.557.027.000,00	51,69	1.883.427.000,00	2,33	753.370.629,00	2,33
2005	5.054.241.000,00	17,42	60.695.485.000,00	66,03	2.513.164.000,00	33,44	1.005.265.563,00	33,44

Sumber: BPR Bank Pasar Kabupaten Sleman. Data diolah.

pendapatan lainnya banyak terserap untuk pemberian bunga bagi nasabah sehingga akan mengurangi jumlah pendapatan yang diterima Bank Pasar Sleman. Besaran pendapatan yang diperoleh Bank Pasar Sleman mempengaruhi penerimaan Pemerintah Kabupaten Sleman dari bagian laba, sehingga besaran yang akan diterima Pemerintah Kabupaten Sleman tergantung pada pendapatan yang diperoleh Bank Pasar Sleman.

Meskipun apabila dilihat dari persentase laba yang diterima sangat fluktuatif dan bahkan terkadang menurun. Nominal pendapatan yang diterima Pemerintah Kabupaten Sleman apabila diamati pertahun terjadi trend peningkatan, berapapun besaran laba yang diterima Pemerintah Kabupaten Sleman dari data lima tahun terakhir ini masih sangat menguntungkan bagi Pemerintah Kabupaten Sleman, dibandingkan apabila dana yang ada tersebut disimpan dalam bentuk deposito maupun tabungan, sehingga penyertaan modal pada Bank Pasar Sleman masih perlu dilakukan. Pendapatan dari laba Bank Pasar Sleman tersebut masih menjadi salah satu sumber penerimaan PAD Kabupaten Sleman dan masih dapat dioptimalkan, seiring dengan peningkatan kinerja perbankan dari Bank Pasar Sleman.

Penyertaan Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman pada Bank Pasar Sleman disamping untuk alasan yang telah dielaborasi diatas juga karena keinginan dari Pemerintah Kabupaten Sleman untuk memperoleh pendapatan dari bagian laba yang diperoleh Bank Pasar Sleman sebagai salah satu sumber penerimaan dalam PAD. Besaran kontribusi bagian laba Bank Pasar Sleman bagi PAD Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

Apabila dilihat dari besaran persentase penerimaan Pemerintah Kabupaten Sleman dari laba Bank Pasar Sleman jika dibandingkan dengan PAD Kabupaten Sleman, masih sangat kecil, selama tahun 2002 sampai dengan 2006 kontribusi yang diberikan dari penerimaan laba Bank Pasar Sleman berada dalam kisaran terendah 0,95 % sampai tertinggi 2,01 %. Tetapi besaran kontribusi penerimaan laba ini sangat tergantung pada besaran PAD, karena sumber penerimaan PAD Kabupaten Sleman lebih banyak berasal dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Sampai saat ini kontribusi penerimaan PAD Kabupaten Sleman dari hasil kekayaan yang dipisahkan seperti halnya dalam Bank Pasar Sleman maupun BUMD lainnya memang belum menunjukkan angka yang besar.

Meskipun jika dilihat dari persentase, kontribusi pada PAD masih sangat kecil, tetapi secara akumulatif bila dibandingkan antara modal yang disetor dengan perolehan laba menunjukkan jumlah nominal yang cukup besar. Akumulasi modal disetor sampai tahun 2005 sebesar Rp5.054.241.000,00 sedangkan akumulasi perolehan laba sampai tahun 2005 yang disetor tahun 2006, mencapai Rp6.971.030.666,00. Berdasarkan hal tersebut terlihat ada selisih keuntungan sebesar Rp1.916.789.666,00 atau ada peningkatan 137,92 % dari akumulasi modal disetor. Akumulasi penerimaan ini dihitung sejak tahun 1970 sampai dengan tahun 2005. Besaran penerimaan laba ini cukup besar dan telah melampaui besaran modal disetor.

Dalam perkembangan sekarang, ada kecenderungan peningkatan besaran penerimaan setiap tahunnya sejalan dengan jumlah modal disetor.

Tabel 15
Kontribusi Bagian Laba Bank Pasar Sleman pada
PAD Kabupaten Sleman, Tahun 2002-2006

Tahun	Bagian Laba	PAD	Persentase
2001	821.111.763,00	40.795.122.803,56	2,01
2002	345.427.038,00	50.457.136.041,85	0,68
2003	736.238.961,00	58.402.599.877,07	1,26
2004	753.370.629,00	79.581.477.340,31	0,95
2005	1.005.265.563,00	86.640.745.946,80	1,16

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Penambahan modal disetor tersebut akan meningkatkan operasional perbankan. Peningkatan jumlah kredit dikucurkan tersebut berjalan seiring dengan penambahan modal disetor, artinya kenaikan modal disetor akan menaikkan jumlah kredit. Berdasar kenaikan jumlah kredit tersebut selanjutnya akan meningkatkan pendapatan Bank Pasar Sleman. Peningkatan pendapatan tersebut pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan Pemerintah Kabupaten Sleman yang berasal dari pembagian laba.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penyertaan modal dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Sleman untuk menjaga kelangsungan Bank Pasar Sleman agar dapat terus beroperasi sehingga tujuan pembentukan Bank Pasar Sleman untuk melindungi masyarakat Sleman terutama usaha kecil dan menengah dari berbagai praktik keuangan yang tidak sehat dapat terwujud. Di samping itu, penyertaan modal dapat mendorong pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Sleman sekaligus berperan menjadi sumber penerimaan PAD bagi Pemerintah Kabupaten Sleman. Penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Sleman pada Bank Pasar Sleman dilakukan untuk menjawab kebutuhan pasar, karena dalam perkembangannya Bank Pasar Sleman semakin diterima dan dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga untuk meningkatkan eksistensi Bank Pasar Sleman agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan peningkatan pengucuran kredit diperlukan suntikan modal. Eksistensi Bank Pasar Sleman semakin menguat dengan *market share* yang melampaui batas administratif Kabupaten Sleman. Bank Pasar Sleman dapat memberikan kontribusi pada penerimaan PAD Pemerintah Kabupaten Sleman dengan cukup besar sebanding dengan penyertaan modal yang diberikan. Pembagian laba dari Bank Pasar Sleman cukup berarti sebagai salah satu sumber penerimaan PAD yang dapat dikembangkan lebih lanjut, karena adanya tren semakin meningkatnya kinerja Bank Pasar Sleman tersebut. Eksistensi Bank Pasar Sleman yang semakin diterima dan dipercaya masyarakat Sleman dan sekitarnya bisa menjadi potensi besar untuk dikembangkan dan nantinya dapat dijadikan alternatif

utama untuk meraup penerimaan PAD Pemerintah Kabupaten Sleman dari komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Saran

Perlunya dilakukan analisis kecukupan modal untuk mengetahui seberapa besar modal yang diperlukan hingga tercapai titik optimal dalam perolehan laba. Analisis ini dapat dilakukan dengan melihat kekuatan pasar, segmen pasar, tren pasar, dan sumberdaya yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan keberadaan Bank Pasar Sleman.

DAFTAR PUSTAKA

- Heliati, Ratni. (1997). Tesis: *Evaluasi Laba BUMD Bank Karya Pruduksi Desa Kab. Dati II Bandung*. Yogyakarta: MEP UGM.
- Hendriawan. (1998). Tesis: *Pengaruh Penyertaan Modal Pemda Terhadap Kinerja BPR Kotamadya Bandar Lampung*. Yogyakarta: MEP UGM
- Kuncoro, M. (2003). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Laporan Tahunan Tahun 2005 (2005). PD BPR "Bank Pasar" Kabupaten Sleman.
- Nick Devas dkk. (1998). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta: UI Press.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 30 Tahun 1995 tentang *Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman*.
- Pratikno. (2002). *Silabus dan Pointer; Keuangan Daerah*. Yogyakarta: MEP UGM.
- Rangkuti, Freddy. (2003). *Riset Pemasaran*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama dan Sekolah Tinggi Ekonomi IBII

Riwu Kaho, Josef. (1998). *Prospek Otonomi Daerah di Negara RI*. Jakarta: Rajawali Pers.

Subagyono, Untung. (1996). Skripsi: *Penerapan Analisis Rasio Dalam Interpretasi Informasi Akuntansi Sebagai Alat Bantu Manajemen Bank*. Bandar Lampung: FE UBL.

Sutanta, R. Sri. (1996). Skripsi: *Penilaian Kinerja BRI Unit Desa Dalam Kaitannya Dengan Profitabilitas, Efisiensi Usaha, dan Resiko Usaha*. Yogyakarta: FE UGM.

Taswan. (2006). *Manajemen Perbankan Konsep, Teknik, dan Aplikasi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang *Perusahaan Daerah*.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang *Perbankan*.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.